

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah Negara kesatuan yang menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan landasan hukum lainnya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, maka pembangunan dilaksanakan melalui Otonomi Daerah. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah memiliki otoritas mengelola keuangannya sendiri yaitu disebut dengan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berkaitan dengan kebijakan keuangan Negara yaitu untuk mewujudkan terhadap ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dan

memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, maka dengan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintah yang diserahkan kepada otonom (Sun'an dan Senuk 2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, yang dimaksud dengan desentralisasi fiskal adalah kewenangan dan tanggung jawab yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan anggaran daerah. Dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi tersebut, maka pemerintah daerah diberi keleluasan (diskresi) untuk mengelola dan memanfaatkan sumber pedapatan daerah yang dimilikinya. Pendapatan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendaptan lain-lain.

Pemerintah daerah diberikan hak untuk merancang kebijakan mereka sendiri sesuai dengan kerangka otonomi daerah agar tercapai tujuan nasional, namun tetap adanya kesesuaian dengan rencana strategi pemerintah pusat. Kebijakan ini disusun berdasarkan potensi, kondisi, dan kebutuhan di masing-masing daerah. Berbagai kebijakan tersebut dijabarkan dalam bentuk program dan aktivitas yang nantinya didanai melalui anggaran pemerintah daerah (Ritonga, Colin Clark, Guneretne Wickremasinghe 2012). Pada dasarnya Pemerintah daerah memiliki program dan aktivitas yang berbeda-beda, sehingga setiap daerah akan

memiliki alokasi anggaran yang bervariasi. Program dan aktivitas yang berbeda serta tidak adanya aturan yang detail mengenai pengelolaan keuangan daerah yang akhirnya menghasilkan variasi pada kondisi keuangan (Ritonga, Ritonga, Colin Clark, Guneretne 2019).

Kondisi keuangan merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangan pada waktu yang tepat, sementara pada saat yang sama memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan (Ritonga dkk, 2019). Kondisi keuangan daerah mengacu pada kemampuan suatu organisasi pemerintah dalam menyediakan pelayanan dan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Perkembangan yang terjadi saat ini, terdapat kesenjangan penelitian antara sektor bisnis dan sektor publik dalam mengukur dan menilai kondisi keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan model penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa riset mengenai dimensi yang harus diterapkan dalam menilai kondisi keuangan pemerintah daerah. Pandangan yang diungkapkan (Chaney & Sherman dalam Ritonga dkk, 2012) menyatakan bahwa pemangku kepentingan daerah menemukan kesulitan dalam mengukur kondisi keuangan pemerintah daerah. Kondisi keuangan pemerintah daerah tersebut yaitu apakah harus dinilai dengan predikat baik, cukup baik, atau bahkan buruk. Keadaan tersebut pada umumnya disebabkan oleh kurangnya kesepakatan mengenai model, dimensi dan indikator yang sesuai dalam mengukur kondisi keuangan daerah, selain itu belum adanya standar baku yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur kondisi keuangan daerah, selain itu belum adanya standar baku yang digunakan sebagai acuan mengukur kondisi keuangan daerah.

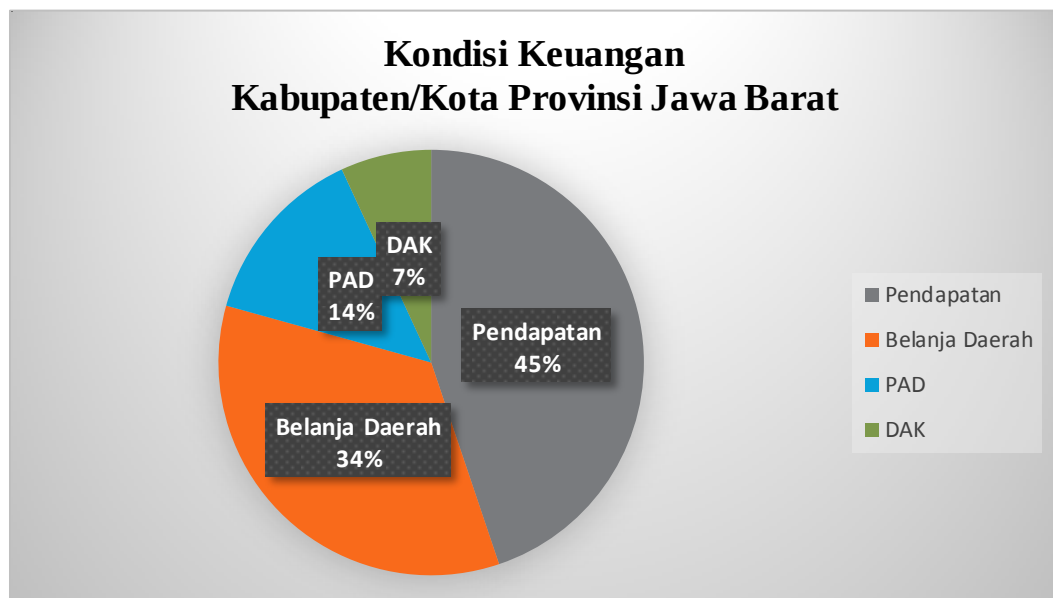
Banyaknya kasus-kasus mengenai buruknya kondisi keuangan pemerintah daerah Indonesia masih menjadi isu terhangat yang perlu dikaji lebih dalam. Seperti permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018 mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah, terdapat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adanya kerugian negara akibat sejumlah pengerjaan proyek dan program pengerjaan jalan yang tidak sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yaitu, ditemukan selisih pengeluaran mencapai Rp.17 milyar. Masalah lainnya yaitu administrasi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berdampak terhadap kondisi keuangan yaitu kurangnya kas daerah. Selain itu tahun 2018 diperkirakan Pendapatan Asli Daerah akan turun sebesar 2,74 persen hingga mencapai Rp.17.584,97 milyar, mengakibatkan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat alami defisit, disebabkan tidak seimbangnya antara pendapatan daerah dengan pengeluarannya.

Permasalahan lain mengenai kondisi keuangan daerah yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2018, terjadinya kondisi keuangan yang buruk terdapat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yaitu, adanya kasus administrasi yang terjadi di RSUD Lembang. Kasus tersebut adalah persoalan penyalahgunaan anggaran BPJS Kesehatan senilai kurang lebih Rp7,7 milyar anggaran tahun 2017 dan 2018 oleh oknum dokter di rumah sakit. Selain itu, terjadinya korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun 2018 yang mempengaruhi kondisi keuangan Pemerintah Daerah dengan memotong DAK Pendidikan sebesar 14,5 persen dari total Rp.46,8 milyar. Masalah lainnya,

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung juga mengalami defisit anggaran, defisit tersebut terjadi karena sejumlah pendapatan Pemerintah kota Bandung tidak mencapai target. Defisit anggaran terjadi selain karena tidak tercapainya target pendapatan, juga karena pengeluaran atau belanja Kota Bandung meningkat. Adapun Kondisi keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi diprediksi belum normal hingga akhir tahun, itu terjadi karena defisitnya anggaran daerah yang cukup besar. Dampaknya, sejumlah kendala terjadi pada penggunaan anggaran selama tahun 2018. Sehingga, pemerintah daerah tengah memaksimalkan penarikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi.

Grafik 1.1

Kondisi Keuangan Daerah



Berdasarkan penelitian Ritonga, dkk (2019) bahwa Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh pendapatan daerah, pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi daerah dalam menunjang

pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah. Pendapatan mengacu pada sumber daya yang dihasilkan oleh pemerintah daerah itu sendiri serta mempengaruhi layanan dan barang yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pendapatan daerah juga merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang “Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah” bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.

Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Pendapatan lain-lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan undang-undang. Sedangkan Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan lain-lain daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi dana hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Ritonga, dkk (2019) menyatakan bahwa kondisi keuangan Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh pendapatan daerah. Permasalahan yang ditemukan mengenai kondisi keuangan yang dipengaruhi oleh

pendapatan pada pemerintah daerah kabupaten/ kota di wilayah Provinsi Jawa Barat yaitu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung yang mengalami defisit anggaran. Defisit tersebut terjadi karena sejumlah pendapatan Pemkot Bandung tidak mencapai target. Defisit anggaran terjadi selain karena tidak tercapainya target pendapatan, tetapi karena pengeluaran atau belanja Kota Bandung meningkat. Selain itu, Pemerintah Kabupaten [Subang](#) alami defisit anggaran di tahun 2018 nilainya tak tanggung-tanggung mencapai Rp 249 milyar. Akibat kejadian itu, kas daerah kosong dan Pemerintah Kabupaten Subang terancam tidak bisa membayar gaji puluhan ribu Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah Kabupaten Subang akan melakukan efisiensi program belanja serta meningkatkan pendapatan daerah.

Kondisi keuangan pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh populasi penduduk (Ritonga, dkk 2019), dengan bertambahnya populasi penduduk maka lebih banyak fasilitas publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada publik. Menurut Badan Pusat Statistik (2015), penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Populasi penduduk merupakan sumber daya utama yang berpengaruh besar terhadap pembangunan di suatu wilayah (*Population Reference Bureau* (PRB), 2011). Menurut Restu Ratri Astuti (2014) mendefinisikan populasi penduduk adalah sejumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi. Negara Indonesia merupakan salah satu Negara

yang mempunyai populasi pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Menurut data dari Tribunnews.com Indonesia berada pada posisi keempat jumlah penduduk terbanyak di dunia. Di Indonesia jumlah penduduk saling berkaitan dengan pembangunan ekonomi, karena populasi penduduk mempengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan acuan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ritonga dkk, (2019) dalam mereplikasi indeks kondisi keuangan pemerintah daerah, dengan judul *Factors Affecting Financial Condition of Local Government in Indonesia*. Adapun perbedaan penelitian tersebut yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu, daerah wilayah Provinsi Jawa Barat sedangkan peneliti terdahulu meneliti seluruh daerah di Indonesia. Penulis juga akan melakukan penelitian mengenai pendapatan daerah dan populasi penduduk sebagai faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan daerah menggunakan tahun anggaran 2016-2018, sedangkan penelitian terdahulu meneliti faktor jumlah penduduk, profil umur, kekayaan, kepadatan penduduk, biaya, efektifitas keuangan, dan pendapatan dengan menggunakan tahun anggaran 2010.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul mengenai **“Pengaruh Pendapatan Daerah dan Populasi Penduduk terhadap Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2018”**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah yang akan diteliti di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kondisi keuangan Provinsi Jawa barat tahun 2018 alami devisit, disebabkan tidak seimbangnya antara pendapatan daerah dengan pengeluarannya. Pendapatan sebesar Rp 3,023 triliun sementara anggaran belanja mencapai Rp. 3,295.
2. Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 adanya kerugian negara akibat sejumlah pengerjaan proyek dan program. yaitu, ditemukan selisih pengeluaran mencapai Rp 17 miliar. Masalah lainnya yaitu administrasi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berdampak terhadap kekurangan kas daerah.
3. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengalami defisit anggaran. Hal ini mempengaruhi Kondisi Keuangan. Defisit tersebut terjadi karena sejumlah pendapatan Pemkot Bandung tak mencapai target. Defisit anggaran terjadi selain karena tidak tercapainya target pendapatan, juga karena pengeluaran atau belanja Kota Bandung meningkat.
4. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terganjal oleh kasus administrasi yang mempengaruhi kondisi Keuangan Pemerintah Kab Bandung Barat, terjadi di RSUD Lembang. Kasus tersebut adalah persoalan penyalahgunaan anggaran BPJS Kesehatan snilai kurang

lebih Rp7,7 miliar anggaran tahun 2017 dan 2018 oleh oknum dokter di rumah sakit berpelat merah;

5. [Kondisi](#) keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi diprediksi belum normal hingga akhir tahun. Itu terjadi karena defisitnya anggaran daerah yang cukup besar. Dampaknya, sejumlah kendala terjadi pada penggunaan anggaran selama 2018 ini. pemerintah daerah tengah memaksimalkan penarikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi. Dengan PAD ini, dia berharap kegiatan pelayanan publik, pembangunan dan honor para pegawai bisa tertutupi.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis akan mengidentifikasi masalah di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Pendapatan Daerah di Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Barat
2. Bagaimana Populasi Penduduk di Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Barat
3. Bagaimana Kondisi Keuangan di Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Barat
4. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Barat

5. Seberapa besar pengaruh Populasi Penduduk terhadap Kondisi keuangan Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Barat

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pendapatan Daerah di Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Barat
2. Untuk mengetahui Populasi Penduduk di Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Barat
3. Untuk mengetahui Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Barat
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Barat
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Populasi Penduduk terhadap Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Barat

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi pihak pengguna, yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penulis sangat berharap hasil dari penelitian yang dilakukan dapat berguna dan dapat memberikan kontribusi bagi dunia akuntansi khususnya dan disiplin ilmu lain pada umumnya. Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat mengetahui sejauh mana pengaruh Pendapatan Daerah dan Populasi Penduduk terhadap Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berharap hasilnya dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman penulis khususnya mengenai Pendapatan Daerah dan Populasi Penduduk terhadap Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, penelitian ini berguna sebagai bahan penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian untuk meraih gelar Sarjana

Ekonomi Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut serta dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak lain yang akan meneliti dengan kajian yang sama yaitu pengaruh pendapatan daerah dan populasi penduduk terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.

3. Bagi Pemerintah wilayah Provinsi Jawa Barat

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dan pengambilan keputusan, untuk menganalisis Pendapatan Daerah dan Populasi Penduduk terhadap Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah guna meningkatkan kinerja pemerintahan Provinsi/ Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat memberikan kontribusi dalam proses penyelenggaraan pemerintah yang baik Provinsi/ Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.

4. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para pembaca mengenai pengaruh pendapatan daerah dan populasi penduduk terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Moch. Toha No.164, Pelindung Hewan, Kec. Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat 40243.